

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu imigran menjadi salah satu topik yang kian menarik perhatian di berbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggalkan negara asalnya demi mencari keamanan, peluang ekonomi, dan kehidupan yang lebih baik, negara-negara tujuan menghadapi tantangan dalam menangani arus imigran yang terus meningkat. Di satu sisi, kedatangan imigran dapat memperkaya keragaman budaya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran terkait penyediaan lapangan kerja, keamanan, dan ketegangan sosial di kalangan penduduk setempat. Fenomena ini menuntut pendekatan yang bijaksana, di mana kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional tanpa mengesampingkan prinsip kemanusiaan.

Banyaknya tawaran dengan tujuan meningkatkan perekonomian atau peluang kehidupan yang lebih baik membuat orang kurang hati-hati dalam menerima informasi. Hal ini menjadi kekhawatiran negara akan adanya tindakan eksploitasi. Salah satu bentuk eksploitasi yang menjadi perhatian utama adalah perdagangan manusia, di mana individu atau kelompok memanfaatkan situasi kerentanan imigran untuk memperoleh

keuntungan. Dalam banyak kasus, para imigran dijanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik di negara tujuan, namun akhirnya terjebak dalam situasi perbudakan, eksploitasi tenaga kerja, atau bahkan prostitusi paksa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan manusia menjadi kejahatan yang sulit untuk dituntaskan. Perdagangan manusia merupakan bentuk pengiriman, pengambilan dan penjualan manusia yang bertujuan untuk dieksploitasi ke perbudakan, kerja paksa, hingga pekerja seksual. Kejahatan ini telah ada sejak adanya awal kehidupan manusia. Perbudakan dan kejahatan lainnya menjadi hal yang diwajarkan karena belum ditemukannya hak asasi manusia. Seiring berkembangnya jaman, hal tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Midhol, 2022). Beberapa faktor dalam perdagangan manusia disebabkan oleh adanya tingkat kemiskinan yang tinggi, banyaknya angka kependudukan dan budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat (Novianti, 2014). Maka dari itu, kejahatan perdagangan manusia ini sukar diretas dikarenakan beberapa faktor yang disebutkan masih beredar di masyarakat.

Beberapa jenis kekerasan perdagangan manusia meliputi perbudakan, kerja paksa, kegiatan kriminal, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual. Di antara jenis kekerasan tersebut, eksploitasi seksual menduduki nomor pertama yang mana dideteksi mencapai 50% dan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Di Asia Tenggara terdeteksi bahwa ada sekitar 64% perdagangan manusia masuk ke dalam eksploitasi seksual. Pada 2018 tercatat ada 33% perempuan dan 39% anak-

anak perempuan masuk dalam eksploitasi seksual. Rendahnya perlindungan anak-anak membuat mereka kehilangan masa kecil yang baik (UNODC, 2020).

Kawasan Asia Tenggara menjadi penyumbang korban perdagangan manusia yang terbilang cukup besar di dunia. Sebanyak 200.000 orang lebih menjadi korban dari kejahatan ini dan tersebar di beberapa negara (Midhol, 2022). Salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara transit untuk perdagangan manusia adalah Thailand. Dengan menjadi negara transit, Thailand juga terkenal dengan perdagangan manusia yang melibatkan negara tetangganya seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja. Selain itu, Thailand juga menjadi wadah dari korban perdagangan manusia yang berasal dari Rusia, Ceko, Polandia, dll – dan juga mengirimkan korban ini ke negara prioritas yakni Jepang (Arby, 2014). Thailand sebagai negara sumber perdagangan manusia bahkan menjadi tempat transit, menjadikan reputasi negara menjadi buruk dan dipandang rendah dalam keamanan negaranya sendiri. Perdagangan manusia di Thailand telah disebut sebagai “business organization” – yang mana dari tahun 2012 hingga 2014 teridentifikasi terdapat 7800 manusia masuk ke perdagangan manusia, khususnya di eksploitasi seksual. Korban dari eksploitasi seksual ini rata-rata ditemukan di rumah bordil, sex clubs, ataupun di prostitusi jalanan (Saraswati, 2021).

Dalam menangani banyaknya kasus *human trafficking* yang terjadi, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk

mengentaskan kasus ini. Kompleksnya permasalahan membuat peran aktor non-negara (*INGO's*) ikut berpartisipasi dalam menangani dan meminimalisir kasus tersebut. Aktor ini memiliki kepedulian terhadap masyarakat internasional dan bertekad untuk merubah menjadi lebih baik. Kampanye yang dilakukan *INGO's* biasanya berorientasi pada sosial masyarakat – misalnya kampanye dalam penegakan hak asasi manusia, penyelesaian konflik, dan pembangunan negara (Lewis, 2006). *INGO's* memiliki kemampuan berpolitik untuk merencanakan dan merealisasikan tujuan yang telah dibuat. *INGO's* juga dapat memberikan gagasan atau ide mengenai kondisi negara yang bersangkutan. Maka dari itu, *INGO's* dapat memberikan kontribusi dan pengaruh kepada negara dalam pembuatan kebijakan (Auliarini).

International Organization for Migration (IOM) merupakan salah satu aktor non-negara di Thailand yang ikut berperan dalam menangani kasus perdagangan manusia. IOM adalah aktor penting dalam menghadapi tantangan migrasi global, terutama dalam upaya melawan perdagangan manusia. Didirikan pada tahun 1951, IOM beroperasi dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan migrasi yang manusiawi dan teratur, bekerja sama erat dengan pemerintah dan organisasi mitra untuk mendukung para migran di seluruh dunia (*International Organization for Migration*, 2020). Dengan jaringan luas dan kemitraannya, IOM memberikan bantuan dalam respons krisis segera dan perencanaan strategis jangka panjang untuk menangani migrasi paksa, perdagangan, dan penyelundupan yang secara tidak

proporsional mempengaruhi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan migran ekonomi.

Di Thailand, di mana perdagangan manusia menjadi masalah besar, IOM bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan bantuan kepada korban, memperkuat kebijakan migrasi, dan mempromosikan praktik migrasi yang aman (UNODC & IOM, 2021). Melalui program-program Penanggulangan Perdagangan Manusia, IOM tidak hanya memberikan dukungan langsung dan reintegrasi bagi korban perdagangan, tetapi juga berupaya mencegah perdagangan dengan mempromosikan jalur migrasi yang legal, memberikan edukasi kepada para migran tentang risiko yang ada, dan memperkuat upaya penegakan hukum (IOM, 2019). Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan komitmen IOM untuk melindungi hak-hak migran dan mengurangi kejadian perdagangan manusia di kawasan Asia-Pasifik.

IOM (*International Organization for Migration*) dipilih sebagai mitra strategis pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia karena keahlian globalnya dalam isu migrasi dan pengelolaan mobilitas manusia (Gallagher, 2010). Organisasi ini memiliki pengalaman luas dalam menyediakan pelatihan, bantuan teknis, dan pengumpulan data untuk memperkuat kebijakan anti-perdagangan manusia (IOM Thailand, 2023). Selain itu, IOM mengutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan korban sebagai prioritas utama. Pendekatan ini mencakup upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan peningkatan perlindungan bagi

korban, sejalan dengan kebijakan Thailand yang berfokus pada perlindungan migran (Todres, 2012). Melalui jaringan globalnya, IOM mampu memfasilitasi koordinasi antarnegara dan organisasi internasional, memungkinkan Thailand untuk menangani masalah perdagangan manusia yang kompleks dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara (ASEAN-IOM, 2018).

Kemitraan dengan IOM juga memberikan dukungan finansial dan teknis untuk memperkuat kapasitas nasional, seperti pelatihan petugas penegak hukum, pengembangan pusat perlindungan korban, dan peningkatan sistem manajemen migrasi (UNODC, 2017). Dengan pengalaman yang kuat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand, IOM memahami tantangan lokal dan regional, sehingga mampu membantu memanfaatkan hubungan regional seperti ASEAN untuk memperkuat upaya kolaboratif (Gallagher, 2010). Selain itu, IOM berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya Target 8.7 yang berfokus pada penghapusan kerja paksa dan perdagangan manusia (IOM Thailand, 2023). Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, kemitraan ini memperlihatkan komitmen Thailand dalam memerangi perdagangan manusia secara holistik dan selaras dengan agenda global (UNODC, 2017).

Dengan ini, penelitian akan berfokus pada kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Thailand dengan IOM dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia. Maka dari itu, penelitian ini akan

menggunakan pendekatan liberalis institusionalis yang harapannya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori liberalis institusionalis, khususnya dalam permasalahan perdagangan manusia. Selain itu juga diharapkan menjadi penelitian pembaharuan dengan teori dan variabel baru sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baru. Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya permasalahan perdagangan manusia di Thailand yang tinggi dan juga melihat bagaimana kinerja pemerintah Thailand yang bekerjasama dengan organisasi internasional dalam penanganan masalahnya. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dengan *International Organization for Migration* (IOM) menjadi fokus utama dalam penelitian sehingga.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah adanya penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kerja sama antara pemerintah Thailand dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani kasus *human trafficking* di Thailand tahun 2019 hingga 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yakni untuk mengetahui kinerja kerja sama dari pemerintah Thailand dan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand.

Untuk mengetahui apa saja upaya dan program-program yang dilaksanakan antara pemerintah Thailand dan IOM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berjangka panjang dan manfaat praktis merupakan manfaat yang dampaknya terjadi secara langsung. Berikut adalah penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengembangan dan pengetahuan baru, khususnya mengenai kerja sama negara dengan organisasi non-negara bagi pembaca. Selain itu juga dapat memberikan fasilitas pembelajaran serta sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis oleh penulis mengenai kerja sama pemerintah Thailand dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani kasus perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan peningkatan

dan pengembangan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian skripsi sebelumnya karya Della Misti dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya menangani Kasus *Trafficking In Person* Tahun 2015-2017” menyatakan bahwa kasus perdagangan manusia di Thailand telah ada sejak tahun 1970-an. Penelitian ini menggunakan konsep *Human Security* untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dengan banyaknya kasus perdagangan manusia, Thailand masuk ke dalam laporan Trafficking Victime Protection Act yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan 5p. Kebijakan 5p meliputi *Policy, Prosecution, Protection, Prevention, dan Partnership* – yang mana dengan diadakannya kebijakan ini bertujuan untuk memberantas kasus yang terjadi dan mengubah pandangan serta kepercayaan publik terhadap Thailand. Penelitian ini berusaha menggabungkan konsep *Human Security*, dalam aspek *Personal Security*, dengan kebijakan 5p yang dilakukan pemerintah Thailand. Kebijakan 5p berupaya melindungi individu atau kelompok yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Selain itu, kebijakan ini diterapkan melalui Anti TIP Act sejak tahun 2008 (Misti, 2018).

Penelitian kedua karya Bella Putri Saraswati yang berjudul “Peran Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia Di Thailand” mengungkap atau menjelaskan mengenai peran dan upaya pemerintah Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Penelitian ini menggunakan teori peran dan konsep perdagangan manusia untuk menjadi kaca mata dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Teori peran terdiri dari *Role-Consensus*, *Role-Conformity*, *Role-Conflict*, dan *Role-Taking* – di mana teori ini menganalisis perilaku aktor atau dalam penelitian ini mengkaji perilaku pemerintah Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia. Penulis penelitian ini berargumen dalam penerapan teorinya bahwa Thailand melakukan perjanjian dengan negara lain yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh kasus ini. Selain itu, kesesuaian pemerintah Thailand terhadap hukum dengan kesesuaian yang terjadi di lapangan tidak sejalan. Artinya, walaupun terdapat banyak tindakan yang dilakukan pemerintah Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia, di sisi lain pemerintah Thailand secara tidak langsung seperti mendukung adanya permasalahan ini dikarenakan sebagian pendapatan negara diambil dari prostitusi (Saraswati, 2021).

Ketiga, jurnal penelitian karya Irmalia Agustina dengan judul “Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP” menggunakan teori konstruktivisme dan efektifitas kebijakan – penulis berpendapat bahwa korban dari perdagangan manusia di Thailand hampir tiap tahunnya terjadi peningkatan. Peningkatan ini membuat citra nama Thailand menjadi buruk, kemudian hal tersebut mendorong aktor-aktor penting untuk ikut serta dalam inisiatif kebijakan yang membantu penyelesaian perdagangan manusia. Dalam hal ini, Thailand menjalankan rekomendasi dari UNIAP sebagai badan PBB yang

menangani kasus perdagangan manusia yang berdiri pada tahun 2000. Dengan melihat dari rekomendasi UNIAP, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan 5p. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dengan bukti bahwa angka perdagangan manusia tidak berkurang secara signifikan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh hukum-hukum Thailand yang kurang ketat sehingga perdagangan manusia tidak berkurang (Agustina, 2016).

Keempat, penelitian Carolina Omega, dkk yang berjudul “Upaya Multi Track Diplomacy Pemerintah Thailand dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Thailand pada 2015-2017” yang membahas mengenai strategi diplomasi multi-jalur yang diterapkan oleh Pemerintah Thailand untuk mengatasi perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan konsep Multi Track Diplomacy, sebuah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, Thailand bekerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM), *Public, Private Civil Society Partnership* (PPCSP) dan *International Labour Organization* (ILO), serta menjalin kemitraan dengan negara-negara tetangga dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum, melindungi korban, dan memperketat regulasi. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk merespons perdagangan manusia secara efektif tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan dan berfokus pada pencegahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan dalam upaya Thailand

untuk menekan perdagangan manusia, meskipun masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan dan pemberantasan jaringan perdagangan manusia yang kompleks (Omega dkk, 2023).

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ada kerja sama antara pemerintah Thailand dengan organisasi terkait. Selain itu, kebijakan atau program yang dibahas sebelumnya masih mengupayakan keberhasilan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Hal yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada proses kerja sama yang berlangsung atau dilakukan oleh para aktor dan menggunakan teori liberal. Teori liberal identik dengan kerja sama yang digunakan sebagai kaca mata untuk menganalisa. Kerja sama ini dilakukan antara aktor negara dan aktor non negara dengan tujuan yang sama. Fokus dari analisis ini adalah bagaimana aktor negara dengan aktor non negara memiliki kerja sama – apakah kerja sama tersebut dapat terjalin atau tidak.

Dalam menganalisis penelitian mengenai kerja sama antara pemerintah Thailand dan IOM (*International Organization for Migration*) tentang kasus perdagangan manusia, penulis menggunakan perspektif liberalis institusionalis yang mengakar dari perspektif liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme merupakan pandangan yang menekankan pada kebebasan antar individu, asas persamaan atau egalitarianisme, dan kerja sama. Sangat kontras dengan realis, liberalisme percaya bahwa kerja sama dapat menciptakan perdamaian dalam wadah

organisasi internasional. Liberalisme percaya bahwa negara bukanlah aktor, negara hanyalah sekumpulan individu. Sekumpulan individu tadi yang akan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kepentingan nasional menurut liberalis yakni kepentingan individu tadi dan aktor domestik. Negara hanya berfungsi untuk membantu kelompok tertentu dalam mengejar kepentingannya, hal ini dilakukan karena melalui negara kepentingan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pandangan kerja sama menurut liberalis akan menciptakan hubungan non-zero non sum atau bisa disebut dengan mutualisme (saling menguntungkan) dan pihak yang ikut serta akan merasa puas atau *absolute gain* (Rosyidin, 2020).

Liberalisme terpecah menjadi beberapa aliran, salah satunya adalah liberal institusionalis. Aliran ini percaya bahwa aktor non-negara dapat berperan penting dalam sistem internasional. Dalam essay “International Institutional and State Power” karya Robert Keohane, mengatakan bahwa negara dalam bekerjasama dan berkomunikasi bergantung pada institusi. Hal ini dijelaskan bahwa aktor negara dan non-aktor diharuskan memiliki kepentingan yang sama untuk memperoleh hasil dari kerja sama (Zakiyah, 2016). Liberalisme institusionalisme percaya bahwa negara bukan hanya aktor satu-satunya yang memiliki peran dalam politik global, aktor non-negara juga bisa. Aktor non-negara atau institusi ini menjembatani dalam kerja sama internasional tersebut. Maka dari itu, kerja sama yang dilakukan tidak selalu negara dengan negara – bisa juga negara dengan institusi yang diharapkan dalam kerjasamanya dapat memperoleh keputusan atau

kebijakan baru yang lebih baik (Alfatih, 2017). Kerja sama yang dilakukan antar aktor negara dan non-negara muncul karena adanya kebutuhan keduanya yang harus terpenuhi dan terdapat kepentingan atau tujuan yang sama antara keduanya (Keohane dan Nye, 2001 dalam Bagaskara, 2018). Robert Keohane juga berpendapat mengenai kerja sama “Cooperation can be designed to help a few at the expense of the rest; and it can accentuate as well as alleviate injustice in an imperfect world.” (Keohane dan Nye, 2001). Kerja sama multi-aktor ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan atau adanya kepentingan yang sama, melainkan juga untuk membantu satu sama lain dan juga meminimalisir ketidak-adilan yang ada di dunia.

Dalam buku yang berjudul “Power and Interdependence” karya Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye hubungan kerja sama yang terjalin akan menciptakan interdependensi. Upaya kerja sama ini merupakan bentuk untuk meraih tujuan bersama – dengan interdependensi, akan menimbulkan kerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan nilai-nilai yang disepakati (Listy, 2021). Dengan adanya liberal institusionalisme, kerja sama ini tidak hanya berlaku untuk aktor negara dengan aktor negara saja – kerja sama dapat dilakukan antara aktor negara dengan aktor non negara. Dalam hal ini, penulis menekankan bahwa fokus utama dalam penelitian adalah untuk menganalisis kerja sama yang terjalin antara aktor negara dan aktor non negara dan kerja sama ini dapat terjalin atau tidak.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan penjelasan di atas, disebutkan bahwa adanya permasalahan perdagangan manusia ini masih sulit dituntaskan oleh pemerintah. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah Thailand, hingga penetapan kebijakan tetap saja tidak cukup untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. Dengan hal ini, adanya organisasi non-negara ikut serta dalam menangani kasus ini dengan cara bekerja sama dengan pemerintah setempat. IOM (*International Organization for Migration*), sebagai organisasi non-negara, memiliki kerja sama dengan pemerintah Thailand dalam upaya penanganan perdagangan manusia.

Kerja sama antara pemerintah Thailand dan *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2019 hingga 2023 telah menghasilkan program-program strategis yang secara signifikan berkontribusi dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand. Kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif, seperti penguatan mekanisme identifikasi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang difasilitasi oleh IOM, serta pendirian pusat-pusat perlindungan dan rehabilitasi korban. Selain itu, IOM mendukung pemerintah dalam membangun sistem data perdagangan manusia yang terintegrasi, yang menjadi dasar untuk kebijakan berbasis bukti. Program-program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada perlindungan korban dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Hubungan kerja sama yang terjalin erat antara kedua pihak menunjukkan bahwa keterlibatan

aktor internasional mampu memperkuat kapasitas domestik dalam menangani perdagangan manusia. Namun, efektivitas program-program ini tetap menghadapi tantangan, seperti koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan sumber daya, yang memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutannya.

Argumen ini mengarahkan penelitian pada analisis bagaimana kerja sama yang dilakukan pemerintah Thailand dengan *International Organization for Migration* berlangsung, program-program yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama tersebut. Kerja sama dan saling ketergantungan dalam politik internasional tidak hanya dilakukan oleh aktor negara dengan aktor negara saja, melainkan juga aktor negara dan non melalui jalinan kerja sama. Aktor non-negara dapat menjadi sarana pemerintah untuk memulihkan permasalahan di negaranya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Kerja sama internasional

Kerja sama internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh satu aktor maupun lebih dan bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan – seperti memenuhi kebutuhan rakyatnya maupun kebutuhan dari aktor tersebut (Ikbar, 2014 dalam Bagaskara, 2018). Kerja sama yang dilakukan

dapat meliputi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dll. Selain itu, aktor dari kerja sama dapat berasal dari aktor negara dan aktor non-negara serta kerja sama ini bisa berupa bilateral maupun multilateral.

1.7.1.2 Organisasi internasional

Secara definisi, organisasi internasional merupakan wadah atau forum yang disediakan untuk menjalin kerja sama antar sesama anggotanya. Adanya organisasi ini dapat menjadi peran untuk menyelesaikan permasalahan, melakukan negosiasi hingga menjadi tempat para anggotanya untuk melakukan kegiatan (Hartana dan Made Dwi Wahyuni, 2022). Anggota dari organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua yakni *Intergovernmental Organizations (IGOs)* dan *Internasional Non-Governmental Organizations (INGOs)*. Karakteristik dari *Internasional Non-Governmental Organizations (INGOs)* yakni memiliki sifat sukarela bagi yang memenuhi syarat, yang mana tidak ada pihak yang memaksa untuk masuk organisasi tersebut. Kedua, memiliki badan perwakilan dari seluruh anggotanya. Ketiga, adanya penjelasan mengenai struktur, tujuan, dan metode operasional didalam instrumen pokok. Keempat, memiliki sekretariat permanen yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, administratif, dan fungsi

informatif secara kesinambungan. Terakhir, *INGOs* merupakan organisasi permanen yang melaksanakan kesatuan fungsi (Sugito, 2016).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Kerja sama internasional

Konsep kerja sama internasional ini akan masuk pada penelitian kali ini dan akan menjadi fokus utama. Konsep ini akan diterapkan pada kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Thailand dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam penanganan perdagangan manusia. Konsep kerjasama internasional dioperasionisasikan sebagai kolaborasi antara aktor negara dan organisasi internasional dalam mengatasi tantangan lintas batas, seperti perdagangan manusia. Kerjasama ini diwujudkan melalui implementasi kebijakan, program bantuan, dan forum internasional yang mendorong koordinasi dan sinergi antar aktor. Dari kerja sama yang dilakukan dapat memberikan output terhadap permasalahan yang diambil.

1.7.2.2 Organisasi internasional

Organisasi internasional yang masuk dalam penelitian ini adalah IOM (*International Organization for Migration*).

Konsep ini akan digunakan dalam meneliti IOM (*International Organization for Migration*) dalam menjalankan perannya. Konsep organisasi internasional dioperasionisasikan sebagai entitas yang berperan sebagai fasilitator, pelaksana program, dan aktor independen dalam menangani isu global, seperti perdagangan manusia. *International Organization for Migration* (IOM) berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah Thailand dalam menjalankan kebijakan dan program terkait pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Operasionalisasi ini menunjukkan bagaimana IOM tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai arena kolaborasi dan advokasi dalam mendorong kebijakan yang berkelanjutan dan efektif untuk menangani perdagangan manusia di Thailand.

1.7.3 Desain / Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menggambarkan permasalahan yang diambil. Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapat, kemudian akan dideskripsikan dan dicurahkan dalam tulisan ini.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi informasi yang akan dicantumkan ke dalam penelitian, jangkauan penelitian ini akan mencakup tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini difokuskan dalam 5 tahun terakhir, selain itu dibutuhkan beberapa tahun untuk meriset kerja sama yang dilakukan pemerintah Thailand dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam upaya penanganan perdagangan manusia.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni teknik studi literatur. Teknik ini merupakan proses penulis untuk mencari keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini. Teknik studi literatur ini juga memiliki korelasi dengan data yang diambil penulis untuk menunjang argumen penelitian. Jenis data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber terpercaya, seperti jurnal, buku, web pemerintah, web organisasi internasional, dll. Data tersebut akan menjadi penunjang penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif didefinisikan "*Qualitative researchers*

study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them” (Denzin dan Lincoln, 2005: 3, dalam Merriam, 2009: 13). Artinya, penelitian kualitatif ini berusaha mempelajari dan memahami fenomena yang ada. Fenomena tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian yang kemudian akan diriset lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Metode turunan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode kongruen. Pada metode ini, akan dipilah beberapa data yang sesuai dengan variabel penelitian, sehingga didapatkan informasi yang tepat.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan diawali dengan bab I yang membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang masalah, apa rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini hingga metode penulisan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan bab II mengenai gambaran umum. Gambaran umum yang di maksud akan berisikan profil dari aktor yang bersangkutan dan perdagangan manusia yang ada di Thailand. Di lanjut bab III akan membahas analisa dari kerja sama pemerintah Thailand dengan IOM (*International Organization for Migration*) – bagaimana upaya preventif, represif dan program yang dijalankan kedua aktor dalam mengatasi perdagangan manusia. Di

akhir bab IV akan ditutup dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan rekomendasi untuk riset-riset selanjutnya.